

LAPORAN KINERJA

2018

**DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



KATA PENGANTAR

Segenap puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah SWT karena tim penyusun Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dapat menyelesaikan Laporan Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun Anggaran 2018.

Penyusunan Laporan Kinerja ini dilakukan guna memenuhi amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan dijabarkan secara detail melalui Peraturan Menteri Negara PAN Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja adalah wujud pertanggungjawaban kinerja atas pencapaian target kinerja yang telah direncanakan. Target kinerja diukur berdasarkan indikator kinerja yang telah dirumuskan pada dokumen perencanaan RPJMD, Renstra SKPD, RKPD dan Renja SKPD. Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman melaporkan indikator kinerja pengurangan luas kawasan kumuh dan rehabilitasi rumah tidak layak.

Demikian laporan ini disusun sebagai akuntabilitas pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman.

Medan, Februari 2019

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA



Ir. IDA MARIANA HARAHAP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19601125 199203 2 001

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Penyusunan laporan kinerja ini merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) Provinsi Sumatera Utara atas Penggunaan Anggaran. Pernyataan melaksanakan tugas tersebut telah dicantumkan dalam Perjanjian Kinerja yang ditandatangani pada awal pelaksanaan anggaran tahun 2018. Perjanjian Kinerja berisikan penugasan dari Gubernur Sumatera Utara kepada Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara untuk melaksanakan program/kegiatan dengan indikator kinerja. Perjanjian kinerja juga sebagai komitmen penerima tugas untuk melaksanakan kinerja yang terukur berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Dinas PKP) Merupakan Pemisahan Urusan Perumahan hasil pemetaan Urusan Pemerintahan dari Dinas Penataan Ruang dan Permukiman (Tarukim). Pemetaan adalah pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah. Finalisasi Pemetaan SKPD di Provinsi Sumatera Utara di tetapkan melalui Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Susunan Organisasi Dinas PKP di atur melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016.

Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara telah dicantumkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017. Dinas Perumahan dan Kawasan Perkiman melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman antara lain Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyelenggaraan PSU permukiman.

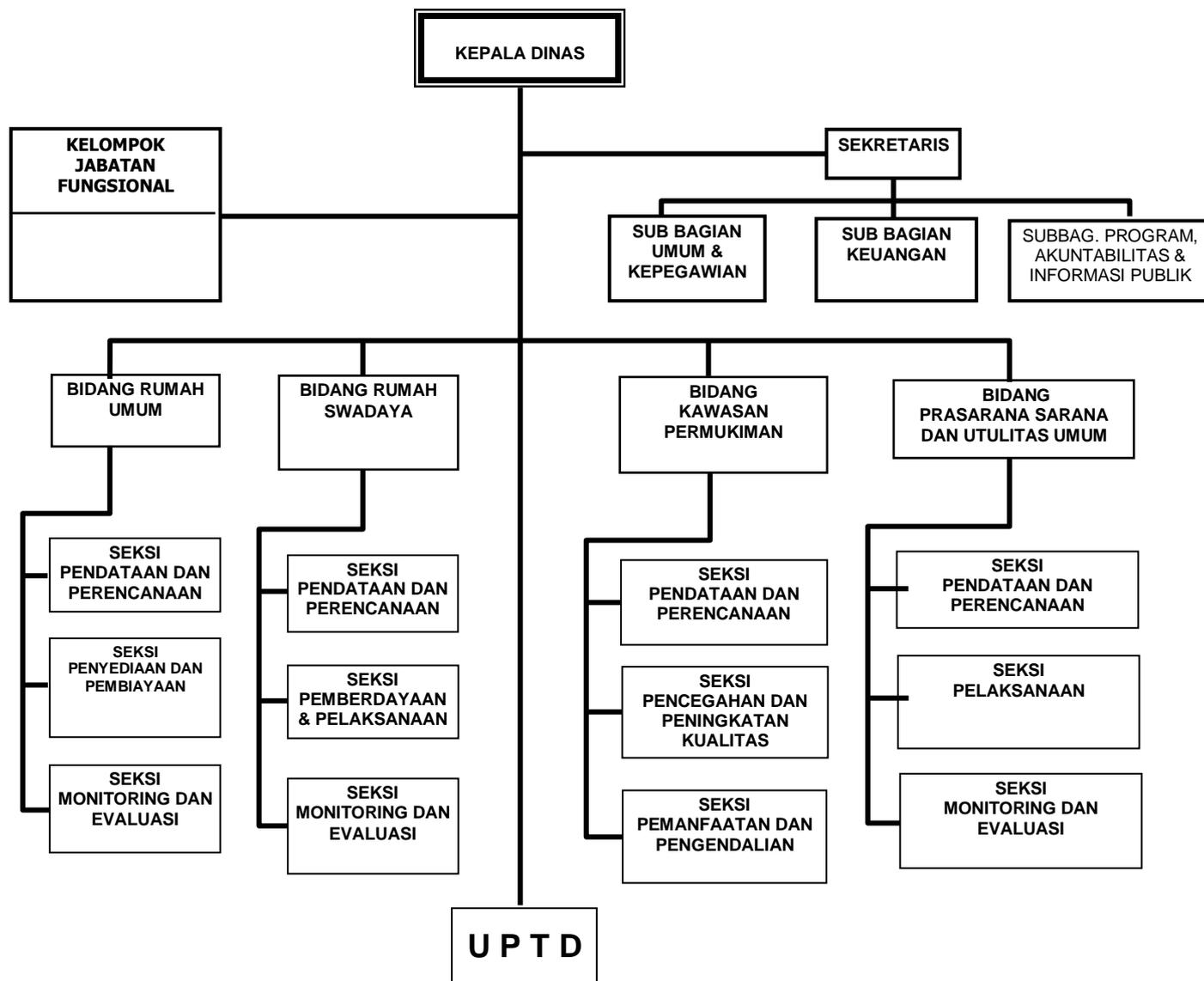
Kondisi kinerja pada sub urusan perumahan adalah belum tersedianya rumah yang layak bagi seluruh masyarakat. Rumah layak yang memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kesehatan dan tersedia kecukupan luas ruang perjiwa. Masih terdapat 192.000 unit rumah tidak layak huni yang belum ditangani. Penyediaan rumah bagi pengungsi korban bencana gunung Sinabung juga masih terkendala penyediaan lahan untuk pembangunannya.

Kinerja di kawasan permukiman diukur dari luas kawasan kumuh. Perkembangan jumlah penduduk dan urbanisasi membuat permukiman perkotaan semakin rentan menghadapi masalah kekumuhan. Pertumbuhan pusat – pusat permukiman yang belum memiliki pengaturan permukimannya mendorong munculnya kawasan kumuh baru. Saat ini lebih dari 9000 Ha kawasan permukiman dinyatakan sebagai kawasan kumuh sesuai penetapan kepala daerah kabupaten / kota se Sumatera Utara. Penanganan kawasan kumuh juga harus dari segala aspek, bukan hanya dari sektor Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman yang sudah kumuh tetapi juga mencegah turunnya kualitas permukiman agar tidak menjadi kawasan kumuh baru.

B. STRUKTUR ORGANISASI

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Utara. Susunan Organisasi Dinas PKP di atur melalui Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 38 Tahun 2016. Dalam pelaksanaan tugasnya Kepala Dinas dibantu Sekretaris, Kepala Bidang Rumah Umum, Kepala Bidang Kawasan Permukiman, dan Kepala Bidang Prasarana Sarana dan Utilitas Umum, dan Kepala Bidang Rumah Swadaya.

Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dapat dilihat pada gambar 1;



Gambar 1. Struktur Organisasi
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara

C. TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Uraian Tugas, Fungsi Dan Tata Kerja Dinas Perumahan Dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Provinsi Sumatera Utara telah dicantumkan dalam Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 23 Tahun 2017. Dinas Perumahan dan Kawasan Perkiman melaksanakan urusan Pemerintahan Bidang Perumahan Dan Kawasan Permukiman antara lain Perumahan, Kawasan Permukiman, Penyelenggaraan PSU permukiman.

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembaran, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
- b. melaksanakan kebijakan perumahan, kawasan permukiman, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kaawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
- c. pelaksanaan evaluasi, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
- d. pelaksanaan administrasi perumahan, kawasan permukiman, perumahan dan kawasan permukiman kumuh, prasarana dan sarana utilitas umum, sertifikasi kualifikasi, klasifikasi dan registrasi bidang perumahan dan kawasan permukiman jalan dan jembatan, jasa konstruksi sesuai dengan bidang lingkupnya;
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur, sesuai dengan tugasnya.

D. POTENSI SUMBER DAYA YANG ADA

1. Sumber Daya Manusia

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara didukung oleh SDM, sampai dengan 31 Desember 2018 sebanyak 121 Orang yang terdiri atas;

• Pejabat Struktural	19	Orang
• Pejabat Fungsional	0	Orang
• Staf Administrasi	102	Orang
Jumlah		121 Orang

Komposisi SDM tersebut berdasarkan strata pendidikan / fungsional / jabatan dan golongan, yaitu:

Menurut Strata Pendidikan;

• S2	:	14	Orang
• S1	:	69	Orang
• D3	:	2	Orang
• SLTA	:	32	Orang
• SD	:	4	Orang
Jumlah	:	121	Orang

Munurut Fungsi/Jabatan Struktural;

• Kepala Dinas	:	1	Orang
• Sekretaris	:	1	Orang
• Kepala Bidang	:	3	Orang
• Kasi/Kasubbag	:	14	Orang
Jumlah	:	19	Orang

2. SARANA DAN PRASARANA UMUM/ASET

Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tidak memiliki aset tetap tanah, maupun bangunan kantor. Aset yang dikelola/dikuasai sampai dengan tanggal 31 Desember 2019 tercantum dalam tabel.1.

No	Jenis Sarana dan Prasarana	Jumlah	Satuan	Kecukupan Barang		Kondisi Barang	
				cukup	Kurang	Baik	Tidak Baik
1	Kendaraan Roda 4	8	Unit	-	√	7	1
2	Kendaraan Roda 2	11	Unit	-	√	5	6
3	Komputer	21	Unit	-	√	10	11
4	Laptop	15	Unit	-	√	9	6
5	Printer	19	Unit	-	√	19	-
6	Meja Biro	6	Buah	-	√	6	-
7	Meja 1/2 Biro	25	Buah	-	√	20	5
8	Meja Rapat	10	Buah	-	√	10	-
9	Meja Komputer	21	Buah	-	√	21	-
10	Meja Kursi dan Tamu	2	Set	-	√	2	-
11	Kursi Putar Besar	4	Buah	-	√	4	-
12	Kursi Putar Kecil	20	Buah	-	√	20	-
13	Kursi Kayu	-	-	-	-	-	-
14	Kusri Lipat	-	-	-	-	-	-
15	Kursi Plastik	-	-	-	-	-	-
16	Lemari 3 Pintu	1	Buah	-	√	1	-
17	Lemari 2 Pintu	-	-	-	-	-	-
18	Lemari Besi	-	-	-	-	-	-
19	Filling Kabinet	10	Unit	-	√	10	-
20	AC	6	Unit	-	√	6	-
21	Televisi	6	Unit	-	√	6	-
22	Mesin Penghancur Kertas	-	-	-	-	-	-
23	Faxmile	-	-	-	-	-	-
24	Infokus/Proyektor	6	Unit	√	-	6	-
25	Brankas	6	Unit	√	-	6	-
26	Soundsystem	2	Set	√	-	2	-
27	Handycam	2	Unit	√	-	2	-

28	Kamera Digital	12	Unit	√	-	12	-
29	Drone	5	Unit	√	-	5	-
30	Server	2	Unit	√	-	1	1
31	Meteran Dorong	9	Buah	√	-	-	-
32	Concrete Hammer Test	4	Buah	-	√	4	-

E. SISTIMATIKA PENYUSUNAN LAPORAN KINERJA

Bab I Pendahuluan

Bab ini berisikan tentang latar belakang penulisan laporan kinerja, struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi, potensi sumber daya manusia di Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Bab II Perencanaan Kinerja

Bab ini berisikan tentang Perjanjian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara.

Bab III Akuntabilitas Kinerja

Dalam bab ini diuraikan mengenai capaian kinerja atas setiap pernyataan kinerja dengan melakukan analisis perbandingan target dan realisasi.

Bab IV Penutup

Dalam bab ini diuraikan kesimpulan umum atas capaian kinerja Distarukim, Permasalahan dan kendala serta strategi pemecahan masalah untuk tahun mendatang.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perjanjian kinerja adalah merupakan ketetapan dan kesepakatan yang merupakan penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Renstra Distarukimsu melalui berbagai kegiatan tahunan. Penetapan kinerja juga merupakan suatu kesanggupan dari penerima mandat untuk mewujudkan suatu capaian kinerja tertentu dengan sumber dana tertentu. Dalam Laporan Kinerja ini ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk Tahun Anggaran 2018 yang mencakup seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Indikator kinerja dan target kinerja disusun sesuai dengan indikator kinerja dan target kinerja pada Perubahan Atas Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Sumatera Utara Tahun 2013-2018. Perjanjian kinerja ini merupakan komitmen bagi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman untuk dapat mencapainya dalam tahun 2018. Penetapan Kinerja terdiri atas komponen sasaran strategis, indikator kinerja, target kinerja, program / kegiatan dan anggaran yang digunakan.

Komponen indikator kinerja yang bersumber dari indikator kinerja pada Rencana Strategis Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2013 – 2018 digunakan untuk mengukur tingkat capaian sasaran strategis. Indikator kinerja juga bertujuan untuk memberikan gambaran mengenai ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi dinas pada akhir periode Rencana Strategis. Hal ini ditunjukkan dari akumulasi pencapaian indikator output maupun out come program kegiatan setiap tahun sehingga kondisi kinerja yang diinginkan pada akhir periode Renstra dapat dicapai. Indikator kinerja pada Renstra Tahun 2013 - 2018 dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja kegiatan. Komponen Indikator kinerja sebagai berikut :

1. Rehabilitasi rumah tidak layak huni;
2. Luas kawasan kumuh;
3. Pembangunan PSU Permukiman MBR

Komponen Target dalam penetapan kinerja SKPD adalah target yang akan dilaksanakan pada tahun 2018 sesuai dengan kegiatan pada program yang dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman. Komponen Program/Kegiatan dalam penetapan kinerja ini bertujuan untuk mencapai target kinerja.

A. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut:

1. Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi.
2. Pembangunan PSU Permukiman MBR.
3. Pembangunan Infrastruktur Permukiman Relokasi Korban Bencana Provinsi.

B. Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman

Program ini memuat kegiatan-kegiatan pokok sebagai berikut :

1. Fasilitasi Penyusunan dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara dan Kabupaten/Kota
2. Bantuan Stimulan untuk meningkatkan kualitas hunian
3. Pembinaan dan pengawasan pembangunan perumahan
4. Penyusunan NSPK, sosialisasi, penyuluhan dan publikasi bidang perumahan dan permukiman
5. Pilot proyek hari keluarga nasional

Komponen Anggaran adalah kemampuan pendanaan yang diadakan untuk pelaksanaan kegiatan sesuai dengan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk dilaksanakan oleh Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Untuk jelasnya penetapan kinerja lihat pada lampiran 1.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah bentuk pertanggungjawaban dinas atas keberhasilan maupun kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diperjanjikan dalam Penetapan Kinerja Tahun 2018 dalam rangka mendukung capaian visi dan misi Pemerintahan Provinsi Sumatera Utara. Pertanggungjawaban ini disampaikan dalam bentuk Laporan Kinerja. Dalam laporan kinerja ini disampaikan hasil pengukuran, evaluasi dan analisis kinerja untuk setiap sasaran strategis dan target kinerja dalam Penetapan Kinerja. Target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

Tabel 3.1

Target kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

No	Sasaran	Indikator	Target
1	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	1. Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	600 Unit
2	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman	1. Luas Kawasan Kumuh	1.092 Ha
		2. Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Perumahan Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR)	3.250 Unit

Sumber : Perjanjian Kinerja Gubernur dengan Kepala Dinas Tahun 2018

A. Capaian Kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan target dan realisasi. Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik atau semakin rendah realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin jelek, dengan menggunakan rumus sebagai berikut :

$$\text{Capaian Indikator Kinerja} = (\text{Realisasi/Rencana}) \times 100 \%$$

Pengukuran kinerja dilakukan dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran dan kegiatan. Pengukuran dengan menggunakan indikator kinerja pada level sasaran digunakan untuk menunjukkan secara langsung kaitan antara

sasaran dengan indikator kinerjanya, sehingga keberhasilan sasaran berdasarkan rencana kinerja tahunan yang ditetapkan dapat dilihat dengan jelas. Kemudian nilai capaian kinerja dikelompokkan dalam skala pengukuran sebagai berikut :

Interval Capaian Kinerja	Nilai
>85	Sangat Berhasil
70 – 85	Berhasil
55 – 70	Cukup Berhasil
< 55	Tidak Berhasil

Capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tahun 2018 disajikan dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2
Capaian kinerja Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara tahun 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program / Kegiatan	Anggaran (Rp)	Realisasi		Persentase			
						Kinerja	Anggaran	Kinerja	Anggaran		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
1	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman	1	Luas Kawasan Kumuh	1.092 Ha	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kabupaten /kota yaitu : Langkat, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batu Bara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Pematang Siantar, Simalungun, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Karo, Pakpak Bharat, Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias Selatan.	59.426.114.675	951,68	Ha	58.355.355.936	120,05 %	98,20 %
		2	Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Perumahan MBR	3.250 Unit	Pembangunan PSU Permukiman MBR di Provinsi Sumatera utara, yaitu : Langkat, Deli Serdang, Batubara, Tanjung Balai, Simalungun, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah.	13.991.065.700	2.531	Unit	13.990.575.700	77,9 %	99,99 %
2	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman	1	Rehabilitasi rumah tidak layak huni	600 Unit	Rehabilitasi rumah tidak layak huni di Sumatera Utara, Pilot proyek pelaksanaan hari keluarga nasional, Pembangunan Rumah Relokasi Pengungsi Sinabung, Pilot Proyek Pemanfaatan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Homestay (Penataan Desa Tradisional/Adat)	22.089.024.439	518	unit	19.943.648.937	86,33%	90, 29 %

Jumlah Anggaran Tahun 2018:	113.239.145.633,00
1. Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.553.645.376,00
2. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	4.013.608.550,00
3. Program Peningkatan Disiplin Aparatur	272.000.000,00
4. Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	781.915.805,00
5. Program Peningkatan Pengembangan Sistim Pelaporan Capaian Kinerja dan keuangan	965.825.122,00
7. Program Pembinaan dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman	87.655.597.491,00
8. Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman	25.648.983.702,00

Hasil pengukuran kinerja beserta evaluasi setiap tujuan dan sasaran Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman tahun 2018 disajikan sebagai berikut :

Sasaran Strategis I : Tersedianya Prasarana Dan Sarana Kawasan Perumahan Dan Permukiman Di Sumatera Utara

IKU : 1. Luas Kawasan Kumuh (Ha)
2. Pembangunan Prasarana dan Sarana Utilitas Umum Perumahan MBR (Unit)

NO	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase (%)
	Program Pembinaan Dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman			
1	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di Kabupaten /kota yaitu : Langkat, Medan, Deli Serdang, Serdang Bedagai, Tebing Tinggi, Batu Bara, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Samosir, Toba Samosir, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Dairi, Pematang Siantar, Simalungun, Padang Lawas Utara, Padang Lawas, Mandailing Natal, Tapanuli Tengah, Karo, Pakpak Bharat, Gunung Sitoli, Nias Barat, Nias Selatan.	1.092 Ha	952 Ha	87,17 %
2	Pembangunan PSU Permukiman MBR di Provinsi Sumatera utara, yaitu : Langkat, Deli Serdang, Batubara, Tanjung Balai, Simalungun, Labuhan Batu, Labuhan Batu Selatan, Padang Lawas Utara, Tapanuli Tengah.	3.250 Unit	2.531 Unit	77,87 %

Luas kawasan kumuh pada awal Renstra adalah 1.792 Ha, target Luas Kawasan kumuh pada tahun 2018 adalah 1.092 Ha atau setara dengan pengurangan 700 Ha. Kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi kawasan kumuh adalah dengan melakukan pembangunan/penataan kawasan permukiman kumuh yang tersebar di 33 Kabupaten / kota se Sumatera Utara. Target pengurangan luas kawasan kumuh setiap tahun adalah 200 Ha. Luas kawasan kumuh yang tertangani pada tahun 2014 adalah 166 Ha, tahun 2015 49,52 ha, tahun 2016 95,10 ha dan tahun 2017 218 ha. Total penanganan selama tahun 2014 s/d 2017 adalah 529,12 Ha. Pada tahun 2018 dilakukan Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi di 24 Kabupaten /kota yaitu : Langkat, Medan, D. Serdang, Sergei, T. Tinggi, Batu Bara, Samosir, Tobasa, Humbahas, Karo, Dairi, Tapteng, Madina, Palas, G. Sitoli, Nias Barat, Nias Selatan, Asahan, Labuhan Batu, Labusel, P. Siantar, Simalungun, Paluta, Pakpak Bharat. Area tertangani adalah 311,2 Ha. Luas kawasan kumuh tahun 2018 adalah 1.792 Ha di kurang akumulasi penanganan kawasan kumuh seluas 840,32 Ha yaitu 951,68 Ha.

Tabel perbandingan pengurangan luas kawasan kumuh
Periode 2014 - 2018

Target Sesuai Perubahan RPJMD					Realisasi				
2014	2015	2016	2017	2018	2014	2015	2016	2017	2018
1.592	1.392	1.192	1.292	1.092	1.626	1.576	1.481	1.263	952

Sasaran Strategis II : Peningkatan Kualitas hunian dan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

IKU : 1. Rehabilitasi rumah tidak layak huni

NO	Program / Kegiatan	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase (%)
	Program Pembinaan dan Pengembangan Perumahan dan Permukiman			
1	Rehabilitasi rumah tidak layak huni di Sumatera Utara, Pilot proyek pelaksanaan hari keluarga nasional, Pembangunan Rumah Relokasi Pengungsi Sinabung, Pilot Proyek Pemanfaatan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Homestay (Penataan Desa Tradisional/Adat)	600 Unit	518 Unit	86,33%

Rehabilitasi rumah tidak layak huni dilaksanakan oleh Penyedia jasa konstruksi sejumlah 375 unit rumah yang tersebar Kabupaten Langkat sebanyak 50 Unit, Kabupaten Deli Serdang 50 Unit, Kabupaten Asahan 45 Unit, Kabupaten Padang Lawas 50 Unit, Kabupaten Padang Lawas Utara 50 Unit, Kabupaten Nias Selatan 50 unit dan Kabupaten Nias Barat 80. Sedangkan dengan melalui pola pemberdayaan masyarakat di lokasi peringatan hari keluarga nasional dilaksanakan di Kabupaten Serdang Bedagai 30 Unit. Pada kegiatan Pilot Proyek Pemanfaatan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Homestay (Penataan Desa Tradisional/Adat) dilakukan rehabilitasi rumah tidak layak huni di Kabupaten Humbang Hasundutan 4 unit dan Kabupaten Samosir 4 unit.

B. Realisasi Anggaran

Dana atau anggaran yang teralokasi untuk belanja mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada Tahun 2018 sumber dana APBD Provinsi sesuai Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman adalah sebagai berikut :

i.	Belanja Tidak Langsung	: Rp. 18.543.193.000,-
ii.	Belanja Langsung	: <u>Rp. 125.913.103.000,-</u>
	Total	: Rp. 144.456.296.000,-

Pada pelaksanaannya kegiatan TA 2018, sesuai dengan hasil kesepakatan pada rapat evaluasi penggunaan anggaran di pemerintahan Provinsi Sumatera Utara, maka dilakukan perubahan anggaran yang ditujukan untuk penambahan belanja tidak langsung dan pengurangan belanja yang tidak terlaksana sampai dengan akhir tahun anggaran 2018. Perubahan – perubahan tersebut dibukukan pada Perubahan Penjabaran Pelaksanaan APBD Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018 dan menjadi dasar penyusunan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran (DPPA) Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman, dengan rincian belanja sebagai berikut :

i.	Belanja Tidak Langsung	: Rp. 19.572.926.000,-
ii.	Belanja Langsung	: <u>Rp. 113.239.145.633,-</u>
	Total	: Rp. 132.812.071.633,-

Jumlah anggaran dan realisasi belanja langsung program dan kegiatan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Tahun 2018 dapat dilihat pada tabel 3.3.

Tabel 3.3
Jumlah anggaran dan realisasi program dan kegiatan
Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Pergeseran APBD 2018	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Rp
					(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
	Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman ProvSU	125.913.103.000	113.239.145.633	97,67%	108.551.987.655	95,86%	4.687.157.978
I	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.766.983.330	1.553.645.376	100%	1.346.532.566	86,67%	207.112.810
1	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	39.606.000	19.859.000	100%	12.889.900	64,91%	6.969.100
2	Penyediaan Jasa Komunikasi Sumber Daya Air Dan Listrik	594.992.000	486.968.000	100%	379.810.079	77,99%	107.157.921
3	Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	75.271.000	75.271.000	100%	75.269.100	100,00%	1.900
4	Penyediaan Alat Tulis Kantor	109.942.980	95.978.026	100%	95.977.880	100,00%	146
5	Penyediaan Barang Cetak Dan Penggandaan	100.140.000	100.140.000	100%	95.231.200	95,10%	4.908.800
6	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/ Penerangan Bangunan Kantor	54.724.350	32.892.350	100%	32.891.800	100,00%	550
7	Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan	56.000.000	56.000.000	100%	28.410.000	50,73%	27.590.000
8	Penyediaan Makanan Dan Minuman	146.640.000	146.640.000	100%	136.650.000	93,19%	9.990.000
9	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Keluar Daerah	252.987.000	252.987.000	100%	248.389.107	98,18%	4.597.893
10	Rapat-rapat Koordinasi Dan Konsultasi Dalam Daerah	336.680.000	286.910.000	100%	241.013.500	84,00%	45.896.500

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Pergeseran APBD 2018	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Rp
					(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
II	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	8.821.797.550	4.013.608.550	100%	3.634.004.948	90,54%	379.603.602
11	Pengadaan Perlengkapan Gedung Kantor	1.171.725.670	1.171.725.670	100%	962.463.000	82,14%	209.262.670
12	Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor	2.213.680.800	1.906.160.800	100%	1.831.328.710	96,07%	74.832.090
13	Pemeliharaan Rutin/Berkala Kendaraan Dinas/ Operasional	326.690.500	326.690.500	100%	272.154.558	83,31%	54.535.942
14	Pemeliharaan Rutin/Berkala Perlengkapan Gedung Kantor	149.960.000	149.960.000	100%	114.631.600	76,44%	35.328.400
15	Perencanaan Pembangunan Gedung Kantor Dinas PKP	4.959.740.580	459.071.580	100%	453.427.080	98,77%	5.644.500
III	Program peningkatan disiplin aparatur	272.000.000	237.000.000	100%	236.275.000	99,69%	725.000
16	Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya	272.000.000	237.000.000	100%	236.275.000	99,69%	725.000
IV	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	781.915.805	421.894.805	100%	346.275.250	82,08%	75.619.555
17	Pendidikan dan Pelatihan Formal	585.996.000	303.500.000	100%	260.415.000	85,80%	43.085.000
18	Sosialisasi Peraturan dan Perundang-undangan	195.919.805	118.394.805	100%	85.860.250	72,52%	32.534.555
V	Program peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	965.825.122	915.945.122	100%	702.002.442	76,64%	213.942.680
19	Penyusunan Laporan Neraca Dan Sistim Pembukuan	123.720.000	73.840.000	100%	65.320.000	88,46%	8.520.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Pergeseran APBD 2018	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa
					(Rp)	(%)	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
20	Kegiatan Pembinaan Dan Pengelolaan Barang/Asset Dan Neraca Pada SKPD	131.960.000	131.960.000	100%	115.066.000	87,20%	16.894.000
21	Pengembangan Pengelolaan Informasi SKPD dan Operasional PPID	160.213.700	160.213.700	100%	146.338.700	91,34%	13.875.000
22	Penyusunan LK Dan PK 2018	55.596.962	55.596.962	100%	18.079.582	32,52%	37.517.380
23	Monitoring Dan Pengawasan Pelaksanaan Kegiatan Distarukimsu Tahun 2018	309.335.000	309.335.000	100%	205.756.500	66,52%	103.578.500
24	Penyusunan Program Dan Kegiatan TA 2019	184.999.460	184.999.460	100%	151.441.660	81,86%	33.557.800
VI	Program pembinaan dan pengembangan perumahan dan permukiman	25.648.983.702	24.399.518.489	92,50%	22.044.894.102	90,35%	2.354.624.387
25	Keikutsertaan pada Pameran Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) Medan Fair Tahun 2018	480.893.825	463.493.825	100%	463.493.825	100,00%	-
26	Keikutsertaan pada Pameran MTQ Nasional di Sumatera Utara Tahun 2018	456.079.450	-	-	-	-	-
27	Keikutsertaan pada Pameran Pekan Lingkungan Hidup Indonesia di Jakarta dan Pameran Lingkungan Hidup Sumatera Utara di Medan Tahun 2018	463.434.079	409.781.079	100%	409.781.079	100,00%	-
28	Publikasi Pembangunan Bidang Perumahan dan Bakti Sosial pada Hari Jadi Provinsi Sumatera Utara Tahun 2018	158.285.000	130.285.000	100%	129.933.500	99,73%	351.500
29	Pilot Proyek Pembangunan Infrastruktur Permukiman Perdesaaan di Desa Binaan PKK Provinsi Sumatera Utara	796.157.390	796.157.390	100%	743.071.856	93,33%	53.085.534

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Pergeseran APBD 2018	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa Rp
					(Rp)	(%)	
1	2	3	4	5	6	7	8
30	Koordinasi Pembangunan Kegiatan Bidang Rumah Umum dan Monitoring SPM Bidang Perumahan Rakyat di Provsu	390.350.070	264.850.070	100%	164.599.070	62,15%	100.251.000
31	Pengembangan Kelembagaan Perumahan dan Kawasan Permukiman (POKJA PKP)	194.028.762	41.306.799	100%	41.306.799	100,00%	-
32	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka dukungan Hari Keluarga Nasional	1.006.209.777	1.006.209.777	100%	1.003.752.777	99,76%	2.457.000
33	Koordinasi dan Pendataan Bidang Rumah Swadaya	204.619.887	204.619.887	100%	149.059.036	72,85%	55.560.851
34	Pilot Proyek Pemanfaatan Rumah Tidak Layak Huni menjadi Homestay (Penataan Desa Tradisional/Adat)	931.909.554	931.909.554	100%	764.814.054	82,07%	167.095.500
35	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Luar Kepulauan Nias	7.591.248.454	7.588.977.654	88,95%	6.918.268.312	91,16%	670.709.342
36	Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) di Kepulauan Nias	5.288.810.454	5.284.910.454	95,00%	4.739.911.794	89,69%	544.998.660
37	Pembangunan Rumah Relokasi Pengungsi Sinabung	7.686.957.000	7.277.017.000	90,00%	6.516.902.000	89,55%	760.115.000
VII	Program pembinaan dan pengembangan infrastruktur penataan lingkungan permukiman	87.655.597.491	81.697.533.291	99,01%	80.242.003.347	98,22%	1.455.529.944
38	Koordinasi dan Perencanaan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara	213.971.087	213.971.087	100%	182.421.215	85,26%	31.549.872
39	Monitoring, Evaluasi dan Pengawasan dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara	228.607.500	228.607.500	100%	191.175.925	83,63%	37.431.575

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Pergeseran APBD 2018	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa
					(Rp)	(%)	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
40	Legalisasi Ranperda Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Provsu	518.085.075	34.883.200	100%	29.142.700	83,54%	5.740.500
41	Bantek Penyusunan Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP) di Provsu	2.589.070.000	2.460.775.000	100%	2.405.813.780	97,77%	54.961.220
42	Penyusunan Rencana Detail Engineering Design (DED) Kawasan Kumuh di Provinsi Sumatera Utara	1.818.240.000	1.694.682.000	100%	1.694.682.000	100,00%	-
43	Workshop dan Sosialisasi Peringatan Hari Habitat Sedunia di Provinsi Sumatera Utara	478.089.575	432.089.575	100%	396.251.575	91,71%	35.838.000
44	Koordinasi dan Perencanaan Pembangunan PSU Permukiman Provinsi Sumatera Utara	219.213.554	219.213.554	100%	217.004.716	98,99%	2.208.838
45	Penyusunan Desain Basis Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara	198.660.000	194.923.000	100%	194.923.000	100,00%	-
46	Pengawasan Konstruksi Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh di Provinsi Sumatera Utara	1.834.760.000	1.743.520.000	100%	1.549.850.800	88,89%	193.669.200
47	Pembangunan Prasarana Sarana Utilitas Umum (PSU) di Kawasan Perumahan MBR.	15.259.597.700	13.991.065.700	100%	13.990.575.700	99,99%	490.000
48	Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pembangunan PSU Permukiman Provinsi Sumatera Utara	246.938.000	246.938.000	100%	245.161.000	99,28%	1.777.000
49	Penyusunan Rencana Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PSU Perumahan MBR	405.600.000	354.025.000	100%	352.985.000	99,71%	1.040.000

No.	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Pagu Awal	Pagu Pergeseran APBD 2018	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan		Sisa
					(Rp)	(%)	Rp
1	2	3	4	5	6	7	8
50	Pengawasan Pembangunan PSU Perumahan MBR	468.100.000	456.725.000	100%	436.660.000	95,61%	20.065.000
51	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara	63.176.665.000	59.426.114.675	98,64%	58.355.355.936	98,20%	1.070.758.739

Pada tabel 3.3 juga dapat dilihat terdapat kegiatan pembangunan dengan realisasi fisik tidak 100 %. Kegiatan tersebut adalah kegiatan yang tidak dapat selesai sampai dengan akhir tahun anggaran 2018 dan diberi kesempatan menyelesaikan pekerjaan maksimal 50 hari setelah berakhir masa kontrak walau melewati tahun anggaran 2018. Terdapat 6 (enam) Pekerjaan yang diberi kesempatan tersebut yaitu :

No	Paket Pekerjaan	Nilai Kontrak	Realisasi Fisik	Realisasi Keuangan
1	Pembangunan rumah relokasi pengungsi Sinabung	7.009.200.000	95,01 %	6.308.280.000
2	Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Padang Lawas	1.271.300.000	75 %	928.049.000
3	Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Deli Serdang	1.253.077.000	61 %	764.376.970
4	Rehab Rumah Tidak Layak Huni di Kab. Nias Barat	2.716.100.000	85 %	2.308.685.000
5	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Kab. Humbang Hasundutan	1.880.371.000	75 %	1.316.259.700
6	Penataan dan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kab. Samosir Mendukung Geopark Kaldera Toba	942.855.000	80 %	707.141.250

Pemberian kesempatan melanjutkan pekerjaan terhadap 6 (enam) paket tersebut telah berhasil menuntaskan realisasi fisik menjadi 100 % dari rencana pekerjaan. Sehingga output dan outcome masing – masing kegiatan dapat tercapai.

BAB IV P E N U T U P

A. UMUM

Secara umum, pelaksanaan kegiatan pada Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman baik fisik maupun non fisik Tahun Anggaran 2018 telah dapat terlaksana sesuai dengan perencanaan kegiatan Tahun 2018 yang mencakup rencana kinerja, sasaran dan kinerja kegiatan telah dapat terlaksana secara menyeluruh. Walau terdapat 6 (enam) kegiatan yang terlambat penyelesaiannya.

B. PERMASALAHAN DAN KENDALA UTAMA

Dalam pelaksanaan kegiatan konstruksi dilapangan untuk memperoleh output kegiatan membutuhkan banyak sumber daya manusia yang sesuai dengan latar belakang pendidikan. Kantor dan SDM hanya terletak di Kota Medan sebagai Ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Hal tersebut menjadi hambatan untuk mengendalikan pelaksanaan konstruksi dilapangan.

C. STRATEGI PEMECAHAN MASALAH UNTUK TAHUN MENDATANG

Upaya yang akan dilakukan dalam pemecahan masalah untuk tahun mendatang antara lain :

1. Masalah pembangunan fisik
 - a. Pelaksanaan survey lapangan yang lebih matang terhadap kondisi fisik lapangan pekerjaan, sehingga tidak menimbulkan kendala-kendala yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan fisik dilapangan. Untuk itu perlu dipersiapkan perencanaan matang terutama menyangkut teknis pelaksanaan serta aspek pembiayaan
 - b. Melaksanakan penelitian yang lebih matang tentang kesiapan lahan pelaksanaan fisik. Dalam hal ini perlu adanya kepastian serta jaminan dari masyarakat serta Pemerintah Daerah setempat tentang kesiapan pemanfaatan lahan yang diperlukan untuk pembangunan fisik.

2. Masalah kelembagaan

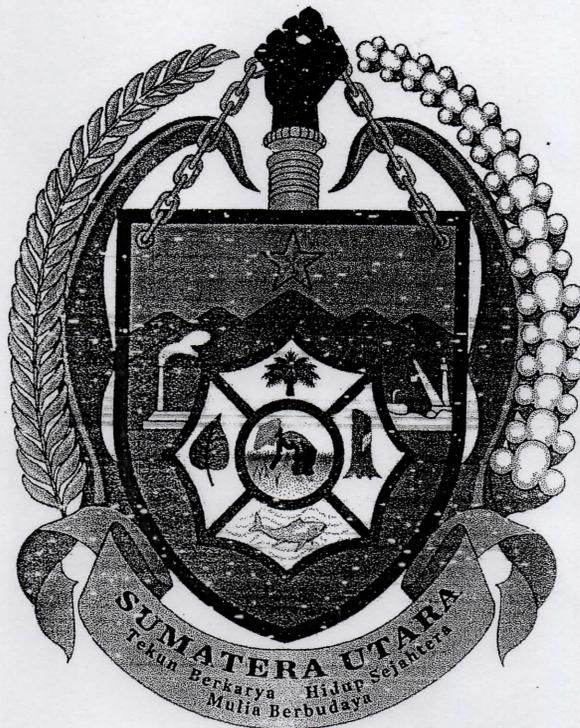
- a. Penugasan atau penempatan staf serta petugas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman pada bidang yang sesuai dengan keahlian dan pengalaman masing-masing
- b. Mengupayakan terbentuknya UPT sehingga mempersingkat rentang kendali pelaksanaan kegiatan.
- c. Melanjutkan kegiatan pembinaan-pembinaan yang diperlukan dalam upaya peningkatan kemampuan aparatur Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman.
- d. Intensifikasi koordinasi antar instansi dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara serta Pemerintah Kabupaten / Kota dengan Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman agar tidak terjadi tumpang tindih kegiatan yang mengakibatkan harus merubah lokasi pekerjaan.

Demikian Laporan Akuntabilitas Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera ini kami sampaikan sebagai bentuk laporan pertanggung jawaban kami kepada pemberi Delegasi Wewenang.

LAMPIRAN

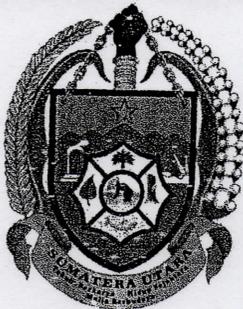
PENETAPAN KINERJA SKPD 2018

**PERNYATAAN
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

PERNYATAAN
PERJANJIAN KINERJA
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi kepada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ir. IDA MARIANA, M.Si
Jabatan : Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Provsu
Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Ir. H. TENGKU ERRY NURADI, M.Si
Jabatan : Gubernur Provinsi Sumatera Utara

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan Target Kinerja yang diperjanjikan sesuai dengan lampiran Perjanjian Kinerja ini dalam rangka mencapai Target Kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam Dokumen Perencanaan (Renstra SKPD dan Renja SKPD). Keberhasilan dan kegagalan berkenaan dengan pencapaian Target Kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi / pengawasan yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi atas Capaian Kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Medan,

2018

PIHAK KEDUA

GUBERNUR SUMATERA UTARA



Dr. Ir. H. TENGKU ERRY NURADI, M.Si

PIHAK PERTAMA

KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN
KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA



Ir. IDA MARIANA, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19601125 199203 2 001

**PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA**

NO	SASARAN STRATEGIS		INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET
	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman	1		
2	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Dan Pengembangan Infrastruktur Penataan Lingkungan Permukiman	1	Pembangunan Prasarana Sarana Umum Perumahan	3.250 Unit
		2	Luas Kawasan Kumuh	1.092 Ha
PROGRAM				
1	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN		ANGGARAN (RP)	KETERANGAN
			25.648.983.702,00	APBD
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN		87.655.597.491,00	APBD
JUMLAH PAGU			Rp 113.304.581.193,00	APBD

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SUMATERA UTARA



Dr. H. H. TENGKU ERRY NURADI, M.Si

Medan,

2018

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA



Ir. JDA MARIANA, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19601125 199203 2 001

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2018
DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN PERMUKIMAN
PROVINSI SUMATERA UTARA

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET	PROGRAM	KEGIATAN	ANGGARAN (RP)
1	2	3	4	5	6	7
1	Terlaksananya Peningkatan Pelayanan Dan Pengembangan Perumahan Dan Permukiman	1 Rehabilitasi Rumah Tidak Layak Huni	600 Unit	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN Rp 25.648.983.702,00	Pilot proyek pembangunan infrastruktur permukiman perdesaan di Desa Binaan PKK Provinsi Sumatera Utara Koordinasi Pembangunan kegiatan Bidang Rumah Umum dan Monitoring SPM Bidang Perumahan Rakyat di Provsu Pengembangan Kelembagaan Perumahan dan Kws.Permukiman (POKJA PKP) Rehabilitasi Rumah tidak layak huni bagi masyarakat berpenghasilan rendah dalam rangka dukungan Hari Keluarga Nasional Koordinasi dan Pendataan bidang Rumah Swadaya	796.157.390 390.350.070 194.028.762 1.006.209.777 204.619.887

				Penyusunan Desain Basis Data Perumahan dan Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara	198.660.000
				Pembangunan prasarana sarana utilitas umum (PSU) di kawasan perumahan MBR	15.259.597.700
				Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Pembangunan PSU Perumahan Provinsi Sumatera Utara	246.938.000
				Penyusunan Rencana Detail Engineering Design (DED) Pembangunan PSU Perumahan MBR	405.600.000
				Pengawasan Pembangunan PSU Perumahan MBR	468.100.000
			2 Luas Kawasan Kumuh	Koordinasi dan Perencanaan Program Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Kumuh Provinsi Sumatera Utara	213.971.087
			1.092 Ha	Monitoring, evaluasi dan Pelaporan Peningkatan Kualitas Kawasan Permukiman Provinsi Sumatera Utara	228.607.500
				Penyusunan Rencana Detail Engineering Design (DED) Kawasan Kumuh di Provsu	1.818.240.000

					Pengawasan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh di Provsu	1.834.760.000
					Penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh Provinsi Sumatera Utara	63.176.665.000

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KETERANGAN
6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	25.648.983.702	APBD
7	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN INFRASTRUKTUR PENATAAN LINGKUNGAN PERMUKIMAN	87.655.597.491	APBD
	JUMLAH PAGU	Rp 113.304.581.193,00	APBD

PIHAK KEDUA
GUBERNUR SUMATERA UTARA

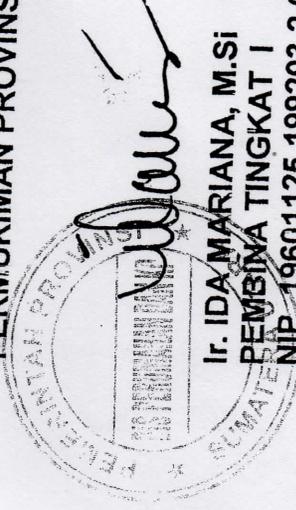


Dr. H. H. TENGKU ERRY NURADI, M.Si

Medan,

2018

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS PERUMAHAN DAN KAWASAN
PERMUKIMAN PROVINSI SUMATERA UTARA



Ir. IDA MARIANA, M.Si
PEMBINA TINGKAT I
NIP. 19601125 199203 2 001

**CAPAIAN PENGURANGAN LUAS KAWASAN KUMUH
KEGIATAN TAHUN 2018**

No	kode Kegiatan	Uraian Paket Pekerjaan	Detail Lokasi (Kecamatan, Desa, Kelurahan)	Outcome (Pengurangan Luasan Kumuh (Ha))
1	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kota Medan	Kec. Medan Area Selatan, Kota Medan	15
2	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kab. Deli Serdang	Jl. Sei Mencitim dan Komplek Kodam Desa Krio Kab. Deli Serdang	15
3	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kab. Serdang Bedagai	Desa Sei Rejo, Kec. Sei Rampah, Kab. Serdang Bedagai	15
4	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kota Tebing Tinggi	Kota Tebing Tinggi	15
5	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kab. Batu Bara	Kel. Lima Puluh Kota, Kec. Lima Puluh Desa Pahlawan, Kec. Tanjung Tiram, Kab. Batubara	15
6	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kab. Asahan	Kel. Tegal Sari dan Kel. Mutiara Kab. Asahan	15
7	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kab. Labuhan Batu	Jl. Balai Desa Kel. Padang Bulan, Kab. Labuhan Batu	15
8	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kab. Labuhan Batu Selatan	Kec. Kota Pinang, Kab. Labuhan Batu Selatan	15
9	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kab. Samosir	Dusun II Lumban Raja, Kab. Samosir	12
10	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kab. Toba Samosir	Kab. Toba Samosir	15
11	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kab. Humbang Hasundutan	Kab. Humbang Hasundutan	15
12	1.04.1.04.01.01.44.65	Pembangunan Infrastruktur Permukiman Rumah Relokasi Pengungsi Sinabung Kab. Karo	Desa Bekerah, Desa Suka Meriah, Desa Simacem, Kec.Siosar, Kab.Karo	
13	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kab. Dairi	Desa Belang Malum Kec. Sidikalang Kab. Dairi	15
14	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kota Pematang Siantar	Kel. Naga Pitu dan Kel. Pondok Sayur Kec. Siantar Martoba, Kota Pematang	15

No	kode Kegiatan	Uraian Paket Pekerjaan	Detail Lokasi (Kecamatan, Desa, Kelurahan)	Outcome (Pengurangan Luasan Kumuh (Ha))
15	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kab. Simalungun 1	Kab. Simalungun	15
16	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kab. Simalungun 2	Jln. Garuda Kec. Perdagangan Kab. Simalungun	20
17	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kab. Tapanuli Tengah	Kab. Tapanuli Tengah	15
18	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kab. Padang Lawas	Kel. Pasar Sibuhuan, Kab. Padang Lawas	15
19	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kab. Padang Lawas Utara	Kel. Pasar Gunung Tua, Kab. Padang Lawas Utara	
20	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kab. Mandailing Natal	Desa Pidoli Lombang, Desa Sipolu - Polu Dolok, Desa Sipolku - Polu Lombang, Kec. Panyabungan Kab. Mandailing Natal	
21	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kota Gunung Sitoli	Desa Olor, Kota Gunung Sitoli	4
22	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kab. Nias Barat	Perumahan Syalom, Perumahan Red Cross, Kab. Nias Barat	4,6
23	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman kumuh Kab. Nias Selatan	Jln. Pramuka-1, Pasar Korea, Kab. Nias Selatan	3,7
24	1.04.1.04.01.01.44.64	Penataan dan peningkatan kualitas kawasan permukiman Kab. Samosir Mendukung Geopark Kaldera Toba	Kab. Samosir	15
25	1.04.1.04.01.01.44.64	Pembangunan Sarana Air Minum Permukiman Kab. Samosir Mendukung Geopark Kaldera Toba	Kab. Samosir	
26	1.04.1.04.01.01.44.64	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Kumuh Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang	Kawasan Kumuh Bandar Setia Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang	1,7
27	1.04.1.04.01.01.44.64	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Kumuh Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang	Kawasan Kumuh Saentis Kec. Percut Sei Tuan Kab. Deli Serdang	1,6
28	1.04.1.04.01.01.44.64	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Kumuh Patumbak Kab. Deli Serdang	Kawasan Kumuh Patumbak Kab. Deli Serdang	1
29	1.04.1.04.01.01.44.64	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Kumuh Kutalimbaru Kab. Deli Serdang	Kawasan Kumuh Kutalimbaru Kab. Deli Serdang	1
30	1.04.1.04.01.01.44.64	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Kumuh Bandar Khalifah Kab. Deli Serdang	Kawasan Kumuh Bandar Khalifah Kab. Deli Serdang	1,8

No	kode Kegiatan	Uraian Paket Pekerjaan	Detail Lokasi (Kecamatan, Desa, Kelurahan)	Outcome (Pengurangan Luasan Kumuh (Ha))
31	1.04.1.04.01.01.44.64	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Kumuh Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan	Kawasan Kumuh Terjun Kec. Medan Marelan Kota Medan	1
32	1.04.1.04.01.01.44.64	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Kumuh Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan	Kawasan Kumuh Rengas Pulau Kec. Medan Marelan Kota Medan (Gg.Pelajar,Gg.Pelajar Ujung,Gg.Busana,Gg.Buntu,Gg.Akasia, Jln.Marelan V)	1,4
33	1.04.1.04.01.01.44.64	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Kumuh Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan Kota Medan	Kawasan Kumuh Tanah Enam Ratus Kec. Medan Marelan Kota Medan	1,5
34	1.04.1.04.01.01.44.64	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Kumuh Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan	Kawasan Kumuh Mabar Kec. Medan Deli Kota Medan	2,3
35	1.04.1.04.01.01.44.64	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Kumuh Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan	Kawasan Kumuh Mabar Hilir Kec. Medan Deli Kota Medan	3,6
36	1.04.1.04.01.01.44.64	Pembangunan Sarana Dan Prasarana Kawasan Kumuh Kab. Pakpak Bharat	Kawasan Kumuh Kab. Pakpak Bharat	2
37	1.04.1.04.01.01.44.64	Pembangunan Sarana Air Minum Permukiman Desa Tanjung Selamat Kab. Deli Serdang	Desa Tanjung Selamat Kab. Deli Serdang	1
38	1.04.1.04.01.01.44.64	Pembangunan Sarana Air Minum Permukiman Desa Tembung Kab. Deli Serdang	Desa Tembung Kab. Deli Serdang	1
39	1.04.1.04.01.01.44.64	Pembangunan Sarana Air Minum Permukiman Desa Lau Dendang Kab. Deli Serdang	Desa Lau Dendang Kab. Deli Serdang	1
40	1.04.1.04.01.01.44.64	Pembangunan Sarana Air Minum Permukiman Desa Amplas Kab. Deli Serdang	Desa Amplas Kab. Deli Serdang	1
41	1.04.1.04.01.01.44.64	Pembangunan Sarana Air Minum Permukiman Desa Kolam Kab. Deli Serdang	Desa Kolam Kab. Deli Serdang	1
42	1.04.1.04.01.01.44.64	Pembangunan Sarana Air Minum Permukiman Desa Bandar Khalipah Kab. Deli Serdang	Desa Bandar Khalipah Kab. Deli Serdang	1
43	1.04.1.04.01.01.44.64	Pembangunan Sarana Air Minum Permukiman Desa Sei Rotan Kab. Deli Serdang	Desa Sei Rotan Kab. Deli Serdang	1
44	1.04.1.04.01.01.44.64	Pembangunan Sarana Air Minum Permukiman Desa Sambirejo Kab. Deli Serdang	Desa Sambirejo Kab. Deli Serdang	1
45		JUMLAH		311,2

**CAPAIAN PEMBANGUNAN PSU PERUMAHAN MBR
KEGIATAN TAHUN 2018**

No.	kode Kegiatan	Uraian Paket Pekerjaan	Lokasi Detail	PSU		
				Output (Jenis, Volume Spesifikasi Output)	Panjang	Outcome (Unit)
1	1.04.1.04.01.01.44.59	Pembangunan PSU Perumahan MBR Kab. Langkat	Perum. Tiara Ara Condong	Cor Beton : 180 m ³	300 m	133
			Perum. Brahrang Indah Permai	Cor Beton : 161,40 m ³	269 m	
2	1.04.1.04.01.01.44.59	Pembangunan PSU Perumahan MBR Kab. Deli Serdang 1	Perum. Davarel Green Wisata	Cor Beton : 165,78 m ³	314,30 m	239
			Perum. Pondok 3 Galang	Cor Beton : 166,21 m ³	339,72 m	
			Perum. Banua Tamora Asri	Cor Beton : 148,20 m ³	241 m	
3	1.04.1.04.01.01.44.59	Pembangunan PSU Perumahan MBR Kab. Deli Serdang 2	Perum. Citra Wahana	Cor Beton : 169,80 m ³	326 m	166
			Perum. Griya Peramata IV	Cor Beton : 211,05 m ³	354,30 m	
4	1.04.1.04.01.01.44.59	Pembangunan PSU Perumahan MBR Kab. Deli Serdang 3	Perum. Taman Sekata Indah	Cor Beton : 260,70 m ³	501 m	166
			Perum. Grand Taman Permata Indah	Cor Beton : 67,20	130,46 m	
				Drainase : 31,52 m ³	286,22 m	
5	1.04.1.04.01.01.44.59	Pembangunan PSU Perumahan MBR Kab. Deli Serdang 4	Perum. Griya Prima Srigunting	Cor Beton : 170,94 m ³	345,5 m	166
			Perum. Griya Mencirim Indah	Cor Beton : 178,73 m ³	326,2 m	
6	1.04.1.04.01.01.44.59	Pembangunan PSU Perumahan MBR Kab. Deli Serdang 5	Perum. Griya Elhaen Sentosa	Cor Beton : 126,50 m ³	128,19 m	180
			Perum. Griya Harapan Baru	Cor Beton : 121,76 m ³	204,6 m	
			Perum. Glamour Mansion I	Cor Beton : 128,75 m ³	261,57 m	
7	1.04.1.04.01.01.44.59	Pembangunan PSU Perumahan MBR Kab. Batu Bara	Perum. Green City Indra Pura	Cor Beton : 257,04 m ³	429 m	133
8	1.04.1.04.01.01.44.59	Pembangunan PSU Perumahan MBR Kab. Simalungun	Perum. Melati Asri	Cor Beton : 134,93 m ³	272 m'	166
				Drainase : 12,93 m ³	201 m'	
			Perum. Puri Marjandi Embong	Cor Beton : 121,68 m ³	191 m'	
			Perum. Cemara Emas	Cor Beton : 74,64 m ³	125 m'	
9	1.04.1.04.01.01.44.59	Pembangunan PSU Perumahan MBR Kota Tanjung Balai	Perum. Sri Wijaya	Cor Beton : 196,44 m ³	327,4 m'	333
			Perum. Griya Nuri Indah	Cor Beton : 210,60 m ³	351 m'	
			Prum. Cemerlang Asri 5	Cor Beton : 199,08 m ³	331,8 m'	
			Perum. Sungai Dua	Cor Beton : 17,40 m ³	29 m'	
10	1.04.1.04.01.01.44.59	Pembangunan PSU Perumahan MBR Kab. Labuhan Batu	Perum. Karya Sempurna	Cor Beton : 84,90 m ³	141,5 m'	166
			Perum. Griya Nusa Tiga Indah	Cor Beton : 245,40 m ³	409 m'	
11	1.04.1.04.01.01.44.59	Pembangunan PSU Perumahan MBR Kab. Labuhan Batu Selatan	Perum. Mitra Bangun Jadi Regenceye	Cor Beton : 323,4 m ³	445,9 m'	250
			Perum. Aek Baru Indah	Cor Beton : 136,54 m ³	225 m'	
12	1.04.1.04.01.01.44.59	Pembangunan PSU Perumahan MBR Kab. Padang Lawas Utara	Perum. RCM Pasar Gunung Tua	Cor Beton : 138,00 m ³	210,7 m'	100
			Perum. Graha Paluta	Cor Beton : 135,51 m ³	208,8 m'	
13	1.04.1.04.01.01.44.59	Pembangunan PSU Perumahan MBR Kab. Tapanuli Tengah	Perum. Sibuluan Nauli Permai	Cor Beton : 343,27 m ³	607 m'	333
			Perum. Permata Garden	Cor Beton : 186,51 m ³	383,5 m'	
			Perum. Sibuluan Indah	Cor Beton : 115,65 m ³	244,8 m'	